

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TRIWULAN I TAHUN 2025

KECAMATAN SERUYAN RAYA

KABUPATEN SERUYAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab instansi dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Seruyan Raya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Triwulan I ini merangkum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi program dan kegiatan, serta realisasi anggaran periode Januari sampai dengan Maret 2025, sekaligus kendala operasional yang dihadapi di lapangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas pelaksanaan program kerja pada triwulan awal tahun anggaran, sekaligus menjadi bahan pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan demi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya di wilayah Kecamatan Seruyan Raya.

Disadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan kualitas laporan kinerja serta sistem pengawasan pada triwulan berikutnya.

Seruyan Raya, 09 April 2025

Camat Seruyan Raya,

M. ABDURADHIYANIE, S.STP

KEBINA TRI. I (IV/b)

NIP. 19860430 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TRIWULAN I

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
- B. Target Kinerja dan Anggaran Per Triwulan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I

- A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
- B. Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan
- C. Analisis Realisasi Anggaran
- D. Hambatan dan Permasalahan
- E. Rekomendasi dan Rencana Aksi Percepatan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem tata kelola organisasi yang baik (good governance) menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan program kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu instrumen akuntabilitas yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Memasuki awal tahun anggaran, Triwulan I Tahun 2025 (periode Januari hingga Maret 2025) merupakan fase krusial yang berfungsi sebagai pondasi pelaksanaan program sepanjang tahun. Pada periode ini, pelaksanaan program sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan internal maupun eksternal, mulai dari penyesuaian regulasi baru, proses administrasi pengadaan, hingga ketersediaan sumber dana yang sering kosong pada awal tahun.

LKjIP Triwulan I Tahun 2025 ini disusun untuk memotret capaian kinerja awal Kecamatan Seruyan Raya, mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan realisasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan demi mengoptimalkan performa organisasi pada triwulan-triwulan berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Triwulan I ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), memetakan permasalahan atau kendala yang memicu terjadinya keterlambatan, serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Melalui laporan ini, diharapkan Seksi dan Sub Bagian terkait dapat memperoleh rekomendasi strategis dan langkah mitigasi risiko yang solutif untuk memacu kinerja organisasi agar tetap berada di jalur yang tepat dalam mencapai target akhir tahun.

C. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penulisan

LKjIP Triwulan I Kecamatan Seruyan Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA TRIWULAN I, memuat Indikator Kinerja Utama serta Target Kinerja dan Anggaran per Triwulan.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I, memuat capaian kinerja IKU, realisasi kinerja dan anggaran program/kegiatan, analisis realisasi anggaran, hambatan dan permasalahan, serta rekomendasi dan rencana aksi percepatan.
- BAB IV PENUTUP, memuat kesimpulan atas capaian kinerja Triwulan I.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TRIWULAN I

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 merupakan target tahunan, bukan target periodik. IKU tersebut menjadi acuan utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi sepanjang tahun anggaran, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85

B. Target Kinerja dan Anggaran Per Triwulan

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis organisasi berjalan secara konsisten dan terukur sepanjang tahun anggaran 2025, target kinerja dan target penyerapan anggaran yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dipecah menjadi target periodik per triwulan menggunakan pendekatan kumulatif. Alokasi pagu anggaran per program pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Alokasi Program dan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja TW I (%)	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	20,3	3.394.509.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	-	7.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	-	38.660.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	-	2.100.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	-	46.370.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	25	10.500.000
Jumlah Pagu Triwulan I				3.499.139.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN I

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna, instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi instansinya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1 Target dan Realisasi IKU Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71	-
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	-

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya

Berdasarkan tabel 3.1, belum terdapat realisasi capaian kinerja IKU untuk Triwulan I. Hal ini dikarenakan penilaian SAKIP dilakukan melalui pengumpulan Lembar Kerja Penilaian Mandiri (LKPM) pada Triwulan I, sedangkan hasil penilaian SAKIP baru diterbitkan pada Triwulan II. Sementara itu, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui survei yang baru dilakukan pada Triwulan IV.

B. Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan

Realisasi kinerja fisik dan keuangan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi pada Triwulan I Tahun 2025, sesuai dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik TW I	Realisasi Keuangan TW I (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85%	3.394.509.000	16,94%	575.187.124
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85%	24.414.000	0%	-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.000.000	0 Dokumen	-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan	6.414.000	2 Laporan	-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.000.000	2 Laporan	-
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85%	2.429.059.616	18%	430.507.944
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2.422.945.616	17 orang/bulan	430.507.944
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.114.000	0 Laporan	-
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	73.568.100	0%	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik TW I	Realisasi Keuangan TW I (Rp)
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	17.068.100	0 Paket	-
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	24.000.000	0 orang	-
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	32.500.000	0 orang	-
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	367.035.600	21,83%	80.132.500
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	3.818.000	0 Paket	-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	48.195.800	0 Paket	-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	2.223.000	0 Paket	-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14 Paket	11.195.300	0 Paket	-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11 Paket	6.576.500	0 Paket	-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	15 Dokumen	1.505.000	0 Dokumen	-
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	50 Laporan	284.290.000	38 Laporan	80.132.500

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik TW I	Realisasi Keuangan TW I (Rp)
- Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	9.232.000	0 Laporan	-
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	100.103.500	0%	-
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1.800.000	0 Unit	-
- Pengadaan Mebel	0 Unit	60.724.000	0 Unit	-
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	32.585.000	0 Unit	-
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	4.994.500	0 Unit	-
1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	314.743.184	20,51%	64.546.680
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	13.635.000	0 Laporan	-
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Laporan	770.000	0 Laporan	-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	300.338.184	3 Laporan	64.546.680
1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85.585.000	0%	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik TW I	Realisasi Keuangan TW I (Rp)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	5 Unit	61.570.000	0 Unit	-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	9.940.000	0 Unit	-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit	14.075.000	0 Unit	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85%	7.000.000	0%	-
2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD di Kecamatan	85%	7.000.000	0%	-
- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.800.000	0 Dokumen	-
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	4.200.000	0 Laporan	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85%	38.660.000	0%	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik TW I	Realisasi Keuangan TW I (Rp)
3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85%	38.660.000	0%	-
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	5 Lembaga	15.000.000	0 Lembaga	-
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	23.660.000	0 Laporan	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85%	2.100.000	0%	-
4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	2.100.000	0%	-
- Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.100.000	0 Laporan	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85%	46.370.000	0%	-
5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85%	46.370.000	0%	-

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renja 2025	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik TW I	Realisasi Keuangan TW I (Rp)
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	15.500.000	0 orang	-
- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	75 orang	30.870.000	0 orang	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85%	10.500.000	0%	-
6.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	10.500.000	0%	-
- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	3.500.000	0 Dokumen	-
- Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	3.500.000	0 Laporan	-
- Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	3.500.000	0 Dokumen	-
JUMLAH TOTAL		3.499.139.000	16,44%	575.187.124

C. Analisis Realisasi Anggaran

Secara total, pagu anggaran yang direncanakan untuk seluruh program pada Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.499.139.000. Hingga akhir Triwulan I, realisasi keuangan mencapai Rp575.187.124 atau sekitar 16,44%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal dan terpusat pada urusan rutin/penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

- Administrasi Keuangan (Gaji dan Tunjangan): merupakan komponen terbesar dengan anggaran Rp2.422.945.616 dan telah terealisasi sebesar Rp430.507.944 (17,72%). Target penerima gaji adalah 22 orang/bulan, namun realisasi menunjukkan sekitar 17 hingga 18 orang per bulan.
- Administrasi Umum (Rapat dan Koordinasi): sub-kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi memiliki penyerapan yang cukup tinggi secara proporsional, yakni Rp80.132.500 dari pagu Rp284.290.000, dengan output sebanyak 38 laporan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: terealisasi sebesar Rp64.546.680 (20,51% dari pagu) yang mencakup penyediaan jasa operasional kantor.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa: belum ada realisasi keuangan dari pagu Rp38.660.000, baik untuk kegiatan partisipasi Musrenbang maupun peningkatan efektivitas pemberdayaan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: pagu sebesar Rp7.000.000 masih utuh dengan realisasi 0%.
- Program Ketentraman dan Ketertiban Umum: kegiatan sinergitas dengan TNI/Polri dan instansi vertikal belum menyerap anggaran dari pagu Rp2.100.000.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Desa: fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan penegakan peraturan desa juga masih tercatat dengan realisasi anggaran 0%.

D. Hambatan dan Permasalahan

Berdasarkan realisasi anggaran dan fisik yang tercatat hingga periode ini, terdapat beberapa hambatan utama:

1. Rendahnya Penyerapan Anggaran Substantif: hampir seluruh program selain penunjang urusan pemerintahan mencatatkan realisasi keuangan sebesar 0%, termasuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Urusan Pemerintahan Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Desa.
2. Ketidaksesuaian Target SDM: terdapat selisih pada jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN, di mana target direncanakan untuk 22 orang/bulan, namun realisasinya hanya berkisar antara 17 hingga 18 orang/bulan.
3. Kesenjangan Administrasi Fisik dan Keuangan: beberapa kegiatan seperti "Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" telah melaporkan capaian fisik (2 laporan), namun realisasi keuangannya masih tercatat Rp0.

E. Rekomendasi dan Rencana Aksi Percepatan

Untuk memperbaiki capaian pada triwulan berikutnya, langkah-langkah strategis yang perlu diambil adalah:

1. Percepatan Eksekusi Program Non-Penunjang: segera memulai pelaksanaan kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa, terutama yang berkaitan dengan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang saat ini masih 0%.
2. Sinkronisasi dan Tertib Administrasi Keuangan: mempercepat proses penagihan dan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan yang secara fisik telah dilaksanakan (seperti penyusunan laporan evaluasi kinerja) agar data realisasi anggaran akurat.
3. Review Kebutuhan Pegawai: melakukan evaluasi terhadap selisih jumlah ASN penerima gaji untuk memastikan apakah diperlukan pengisian jabatan kosong atau penyesuaian pagu anggaran pada perubahan anggaran mendatang.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Realisasi Anggaran: hingga akhir periode pelaporan, total realisasi keuangan mencapai Rp575.187.124 atau sekitar 16,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp3.499.139.000. Capaian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal tahun anggaran.
- Dominasi Program Penunjang: penyerapan anggaran saat ini hampir sepenuhnya terfokus pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan, khususnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Rp430.507.944), rapat koordinasi (Rp80.132.500), serta jasa pelayanan umum kantor (Rp64.546.680).
- Capaian IKU: belum terdapat realisasi capaian IKU pada Triwulan I karena penilaian SAKIP dan survei Indeks Kepuasan Masyarakat baru dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- Hambatan Utama: kendala yang dihadapi meliputi rendahnya penyerapan pada program non-penunjang, adanya selisih jumlah ASN penerima gaji dibandingkan target, serta adanya kesenjangan antara capaian fisik dengan pertanggungjawaban keuangan.

Demikian LKjIP Triwulan I Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja awal tahun, dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Seruyan Raya, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada triwulan-triwulan berikutnya.

Seruyan Raya, 09 April 2025
Camat,

M. ABDI RANUJANI, S.STP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19860430 200412 1 002

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TRIWULAN II TAHUN 2025

**KECAMATAN SERUYAN RAYA
KABUPATEN SERUYAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN SERUYAN RAYA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 ini dapat disusun.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta merujuk pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya. LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas capaian kinerja dan realisasi anggaran Kecamatan Seruyan Raya selama periode April sampai dengan Juni 2025 (Triwulan II) dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Laporan ini memuat perbandingan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan II, disertai analisis hambatan, permasalahan, serta tindak lanjut yang telah dan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari mid-course correction menjelang paruh kedua tahun anggaran 2025.

Semoga LKjIP Triwulan II ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Kecamatan Seruyan Raya serta menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Seruyan Raya, 11 Juli 2025
Camat Seruyan Raya,


M. ABDI RADHIYANIS, S.STP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19860430 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Landasan Hukum	4
C. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
1. Tujuan dan Sasaran	6
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	6
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja	8
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025	8
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	8
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	9
4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	9
B. Realisasi Anggaran	10
C. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025.....	15
BAB IV PENUTUP.....	19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik menuntut adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi di setiap tingkatan instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu instrumen akuntabilitas yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan instrumen kendali mutu yang krusial dalam siklus manajemen kinerja. Melalui monitoring, instansi dapat mengawal kepatuhan proses, ketepatan waktu, dan penyerapan anggaran secara berkeseluruhan, sementara tahapan evaluasi memberikan ruang untuk mengukur capaian riil di lapangan, menganalisis kesenjangan (gap) antara target dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor penghambat yang berpotensi mengganggu pencapaian target akhir tahun.

Pengawasan berkala pada Triwulan II (periode April s.d. Juni 2025) memegang peranan yang sangat strategis. Sebagai penanda paruh pertama tahun anggaran berjalan, evaluasi Triwulan II menjadi momentum krusial untuk melakukan mid-course correction (perbaikan di tengah jalan). Apabila pada periode ini ditemukan adanya keterlambatan realisasi fisik maupun keuangan, instansi masih memiliki sisa waktu dua triwulan ke depan untuk melakukan akselerasi, refocusing, atau perbaikan strategi eksekusi program.

LKjIP Triwulan II Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya, untuk mendokumentasikan capaian kinerja, memetakan deviasi pelaksanaan, serta merumuskan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi di wilayah Kecamatan Seruyan Raya.

B. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Sistematika Penulisan

LKjIP Triwulan II Kecamatan Seruyan Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA, memuat rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Tahun 2025.
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, memuat capaian kinerja, realisasi anggaran, dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II Tahun 2025.
4. BAB IV PENUTUP, memuat kesimpulan dan rekomendasi atas laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya selaras dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan. Sasaran strategis yang menjadi acuan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 bersifat target tahunan, bukan target periodik/kumulatif per triwulan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85

Sumber: Tabel 2.1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahunan. Ringkasan program kerja Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 beserta alokasi anggarannya adalah sebagai berikut:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85%	3.253.485.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85%	1.330.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa Mandiri	85%	29.700.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	85%	2.100.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	85%	46.370.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	1.995.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sasaran strategis dan target kinerja yang diperjanjikan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kecamatan Seruyan Raya untuk periode Triwulan II (April–Juni) Tahun 2025, sebagai bagian dari early warning system menjelang paruh kedua tahun anggaran.

A. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja periode berjalan. Kategori penilaian keberhasilan/kegagalan capaian menggunakan klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (71)	D (0)
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	Belum tersedia (survei TW IV)

Berdasarkan tabel di atas, Capaian Kinerja Nilai SAKIP tercatat D atau 0, disebabkan oleh keterlambatan dalam pengumpulan Lembar Kerja Penilaian Mandiri (LKPM) SAKIP ke Inspektorat Daerah. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat diukur pada Triwulan II karena survei baru dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Rincian hambatan dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Seruyan Raya pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan pengumpulan dokumen LKPM SAKIP ke Inspektorat Daerah, sehingga Nilai SAKIP tercatat 0 (Predikat D);

2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat diketahui karena survei baru dijadwalkan pada Triwulan IV;
3. Aplikasi penatausahaan keuangan sering mengalami gangguan/perbaikan sehingga menghambat proses pengajuan;
4. Keterbatasan kompetensi SDM aparatur yang menjadi faktor penghambat kinerja organisasi;
5. Selisih antara target jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan (22 orang/bulan) dengan realisasi di lapangan (17 orang/bulan);
6. Seringnya perubahan regulasi, terutama dalam penentuan indikator kinerja, menghambat kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Sumber dana di Kas Daerah sering mengalami kekosongan sehingga proses pencairan dana menjadi terhambat;
8. Penyerapan anggaran masih sangat didominasi kegiatan penunjang rutin (gaji dan operasional kantor), sementara beberapa program substantif masih menunjukkan realisasi 0% hingga Triwulan II;
9. Realisasi pemeliharaan barang milik daerah masih sangat rendah (4%), baru menyentuh pajak kendaraan dinas.

Sebagai tindak lanjut, telah dan sedang dilaksanakan sejumlah rekomendasi dan rencana aksi percepatan sebagaimana disajikan pada Sub-bab C (Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi).

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum, penyerapan anggaran Triwulan II (25,15% dari total pagu tahunan Rp3.334.980.000, dengan realisasi kumulatif s.d. Triwulan II sebesar Rp1.413.535.082 atau 42,3%) belum menunjukkan efisiensi yang optimal, karena sebagian besar serapan berasal dari belanja rutin (gaji dan tunjangan ASN serta operasional kantor) yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi terbesar (Rp3.253.485.000), baru terealisasi 25,31% (Rp823.347.958), sementara pemeliharaan barang milik daerah baru mencapai 4% (Rp3.557.164). Sebaliknya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjukkan efisiensi yang relatif baik, dengan realisasi anggaran 50,51% (Rp15.000.000) yang sepenuhnya digunakan untuk kegiatan Musrenbang Desa sesuai target fisik yang ditetapkan (5 dari 5 lembaga kemasyarakatan).

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (realisasi 50,51%) melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa yang telah mencapai target fisik 100% (5 lembaga kemasyarakatan), serta kegiatan Pengadaan Mebel yang telah terealisasi 100% (100 unit).

Sebaliknya, program/kegiatan yang menunjang kegagalan capaian kinerja antara lain: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang masih menunjukkan realisasi 0%; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang seluruhnya masih mencatat realisasi keuangan 0% hingga akhir Triwulan II.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Kecamatan Seruyan Raya pada Triwulan II Tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran (Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85%	3.253.485.000	25,31%	823.347.958
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85%	18.665.000	0%	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 Dokumen)	4 Dok	12.000.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2 Laporan)	2 Lap	665.000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 Laporan)	4 Lap	6.000.000	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85%	2.411.380.616	26,95%	649.729.554
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (22 orang/bulan)	22 o/b	2.410.715.616	17 o/b	649.729.554
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	2 Lap	665.000	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran (Rp)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD (2 Laporan)				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	73.568.100	0%	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (100 Paket)	100 Pkt	17.068.100	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (2 orang)	2 org	24.000.000	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (5 orang)	5 org	32.500.000	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	241.785.600	17,84%	43.128.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2 Paket)	2 Pkt	3.818.000	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (5 Paket)	5 Pkt	48.195.800	1 Pkt	9.431.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Paket)	1 Pkt	2.223.000	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (14 Paket)	14 Pkt	11.195.300	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (11 Paket)	11 Pkt	6.576.500	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (15 Dokumen)	15 Dok	1.505.000	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran (Rp)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah (50 Laporan)	50 Lap	159.040.000	15 Lap	33.697.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Lap	9.232.000	-	-
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	107.757.500	43%	46.300.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1 Unit)	1 Unit	1.800.000	-	-
	Pengadaan Mebel	- Unit	60.724.000	100 Unit	46.300.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (3 Unit)	3 Unit	40.239.000	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (1 Unit)	1 Unit	4.994.500	-	-
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	314.743.184	25,62%	80.632.640
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Laporan)	12 Lap	13.635.000	1 Lap	2.010.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (10 Laporan)	10 Lap	770.000	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (12 Laporan)	12 Lap	300.338.184	3 Lap	78.622.640
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85%	85.585.000	4%	3.557.164

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran (Rp)
	Pemeliharaan/Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (5 Unit)	5 Unit	61.570.000	3 Unit	3.557.164
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (3 Unit)	3 Unit	9.940.000	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Unit	14.075.000	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85%	1.330.000	0%	-
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	85%	1.330.000	-	-
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (1 Dokumen)	1 Dok	665.000	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (12 Laporan)	12 Lap	665.000	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85%	29.700.000	50,51%	15.000.000
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85%	29.700.000	51%	15.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 LK	15.000.000	5 LK	15.000.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran (Rp)
	(5 Lembaga Kemasyarakatan)				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (5 Laporan)	5 Lap	14.700.000	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85%	2.100.000	0%	-
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85%	2.100.000	-	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (12 Laporan)	12 Lap	2.100.000	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85%	46.370.000	0%	-
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85%	46.370.000	-	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (50 orang)	50 org	15.500.000	-	-
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya (75 orang)	75 org	30.870.000	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN	85%	1.995.000	0%	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Fisik	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran (Rp)
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	1.995.000	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (5 Dokumen)	5 Dok	665.000	-	-
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (5 Laporan)	5 Lap	665.000	-	-
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2 Dokumen)	2 Dok	665.000	-	-
	JUMLAH TOTAL		3.334.980.000	25,15%	838.347.958

Sumber: Tabel 3.2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan periode Triwulan II adalah sebesar Rp838.347.958 dari pagu Rp3.334.980.000 (25,15%). Secara kumulatif sejak awal tahun anggaran, realisasi keuangan mencapai Rp1.413.535.082 atau sekitar 42,3% dari total pagu, meningkat dari realisasi Triwulan I yang baru mencapai 16,44%. Penyerapan anggaran masih didominasi oleh kegiatan penunjang rutin, terutama pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Rp649.729.554 untuk 17 dari target 22 orang/bulan), sementara beberapa program substantif lainnya (Pelayanan Publik, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan Pemerintahan Desa) masih menunjukkan realisasi 0% hingga akhir Triwulan II.

C. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025

Sebagai bentuk akuntabilitas dan kesinambungan siklus manajemen kinerja menjelang paruh kedua tahun anggaran, telah disusun matriks tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi percepatan hasil Monev Triwulan II Tahun 2025,

sebagaimana tertuang dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi (Renaksi) Triwulanan tanggal 16 Juni 2025.

No	Rekomendasi/Rencana Aksi	Tindak Lanjut yang Dilaksanakan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
1	Perbaikan tata kelola pelaporan: koordinasi intensif dengan Inspektorat Daerah terkait penyerahan LKPM SAKIP guna memperbaiki predikat kinerja yang tercatat 0 (D) akibat keterlambatan administrasi.	Berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Seruyan untuk penyusunan dan penyerahan LKPM SAKIP serta perbaikan mekanisme pengumpulan dokumen bulanan.	Maret 2026	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Dalam Proses
2	Akselerasi program substantif (mid-course correction): mempercepat eksekusi program yang masih mencatat realisasi 0% (Pelayanan Publik, Koordinasi Ketentraman, Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan Desa).	Menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan pada program-program dimaksud untuk Triwulan III, termasuk sinergitas TNI/Polri, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, dan pembinaan wawasan kebangsaan.	Juli–September 2025 (TW III)	Kasi Trantib / Kasi Pemerintahan / Kasi PMD	Dalam Proses
3	Optimalisasi pemeliharaan aset: meningkatkan realisasi belanja pemeliharaan gedung dan peralatan yang baru mencapai 4%.	Inventarisasi kondisi aset (gedung kantor, peralatan dan mesin) serta mengajukan proses pengadaan jasa pemeliharaan sesuai kebutuhan.	Juli–Agustus 2025	Kasubag Umum & Perlengkapan	Dalam Proses
4	Peningkatan kapasitas SDM: menjadwalkan bimbingan teknis dan	Mengusulkan jadwal bimbingan teknis implementasi	Agustus 2025	Kasubag Umum & Kepegawaian	Dalam Proses

N o	Rekomendasi/Rencana Aksi	Tindak Lanjut yang Dilaksanakan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
	pelatihan bagi aparaturnya untuk mengatasi rendahnya kompetensi.	peraturan perundang-undangan dan diklat pegawai sesuai tugas dan fungsi kepada BKPSDM Kabupaten Seruyan.			
5	Sinkronisasi realisasi fisik dan keuangan: memproses pertanggungjawaban keuangan bagi kegiatan yang secara fisik telah berjalan.	Rekonsiliasi capaian fisik dan dokumen SPJ bersama Bendahara Pengeluaran untuk seluruh sub-kegiatan yang telah terlaksana secara fisik.	Juli 2025	Kasubag Keuangan	Selesai
6	Eksekusi belanja modal dan pengadaan: menuntaskan pengadaan sarana gedung dan mesin lainnya yang realisasinya masih nihil.	Melanjutkan proses pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Peralatan dan Mesin Lainnya, berpedoman pada keberhasilan pengadaan mebel (100%).	Juli–Agustus 2025	Kasubag Umum & Perlengkapan	Dalam Proses
7	Penguatan forum Musrenbang dan pemberdayaan: mempertahankan efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (50,51%) dan menerapkannya pada program lain.	Mendokumentasikan praktik baik pelaksanaan Musrenbang Desa sebagai acuan mempercepat program substantif lain yang tertinggal.	Berkelanjutan	Kasi PMD	Berjalan
8	Monitoring berkala triwulanan: memperketat	Menjadwalkan rapat monitoring internal bulanan	Juli–September 2025	Camat / Sekretaris Kecamatan	Dalam Proses

N o	Rekomendasi/Rencana Aksi	Tindak Lanjut yang Dilaksanakan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status
	pengawasan pada Triwulan III sebagai early warning system.	sebagai persiapan penyusunan Laporan Monev Triwulan III Tahun 2025.			

Berdasarkan matriks tindak lanjut di atas, dari 8 (delapan) rekomendasi dan rencana aksi hasil Monev Triwulan II Tahun 2025: 1 (satu) telah selesai ditindaklanjuti (sinkronisasi realisasi fisik dan keuangan), 1 (satu) berjalan secara berkelanjutan (penguatan forum Musrenbang dan pemberdayaan), dan 6 (enam) lainnya masih dalam proses pelaksanaan yang ditargetkan tuntas pada Triwulan III Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring Kecamatan Seruyan Raya hingga periode Triwulan II Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Utama: Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercatat 0 (Predikat D) dari target B (71), disebabkan oleh keterlambatan pengumpulan LKPM SAKIP ke Inspektorat Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat diukur pada Triwulan II karena survei baru dijadwalkan pada Triwulan IV.
2. Realisasi Anggaran: Realisasi keuangan periode Triwulan II mencapai Rp838.347.958 (25,15% dari pagu tahunan), dengan realisasi kumulatif sejak awal tahun sebesar Rp1.413.535.082 atau 42,3% dari total pagu Rp3.334.980.000, meningkat dari 16,44% pada Triwulan I.
3. Dominasi Program: Capaian kinerja keuangan masih sangat didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta rapat-rapat koordinasi. Meskipun demikian, terdapat progres signifikan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mencapai 50,51% melalui kegiatan Musrenbang Desa.
4. Tindak Lanjut: Dari 8 (delapan) rekomendasi hasil Monev Triwulan II, 1 (satu) telah selesai, 1 (satu) berjalan berkelanjutan, dan 6 (enam) masih dalam proses yang ditargetkan tuntas pada Triwulan III Tahun 2025.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan prioritas percepatan pada paruh kedua tahun anggaran 2025 antara lain: percepatan penyampaian dokumen LKPM SAKIP kepada Inspektorat Daerah; akselerasi eksekusi program-program substantif yang masih menunjukkan realisasi 0%; optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah; peningkatan kapasitas SDM aparatur; serta penguatan monitoring berkala sebagai instrumen pengendalian dini (early warning system) menjelang Triwulan III Tahun 2025.

LKjIP Triwulan II ini diharapkan dapat menjadi landasan objektif bagi pengambilan keputusan strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Seruyan Raya.

Seruyan Raya, 14 Juli 2025
Camat Seruyan Raya,

M. ABDURRAHMAN, S.STP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19860130 200412 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN SERUYAN RAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

TRIWULAN III TAHUN 2025

KECAMATAN SERUYAN RAYA
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab instansi dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Seruyan Raya, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKjIP ini merangkum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi anggaran, hambatan/permasalahan yang dihadapi, serta rencana aksi tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun 2025. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas pelaksanaan program kerja, sekaligus menjadi bahan pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan untuk percepatan capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025.

Disadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan kualitas laporan kinerja serta sistem pengendalian pada periode berikutnya.

Seruyan Raya, 17 Oktober 2025

Camat Seruyan Raya,



M. ABDI RAHMANIE, S.STP

PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 19860430 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Penyajian.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	3
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	3
B. Perjanjian Kinerja dan Target Triwulanan	3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	4
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	4
B. Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan.....	5
C. Realisasi Anggaran	6
D. Hambatan dan Permasalahan	7
E. Rencana Aksi Tindak Lanjut.....	8
BAB IV PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik menuntut adanya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi di setiap tingkatan instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja instansi dalam kurun waktu tertentu, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Triwulan III memiliki nilai strategis karena menandai bahwa tahun anggaran berjalan telah melewati tiga perempat fasenya. Evaluasi pada periode ini bukan lagi sekadar instrumen koreksi tengah jalan (*mid-course correction*), melainkan telah menjadi alarm penentu bagi keberhasilan target akhir tahun. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun 2025, Kecamatan Seruyan Raya mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran, khususnya pada Nilai SAKIP Perangkat Daerah, penyerapan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

LKjIP Triwulan III ini disusun untuk menyajikan capaian kinerja tersebut secara utuh, sekaligus memuat rencana aksi tindak lanjut (*renaksi*) sebagai instrumen pengendalian (*early warning system*) menuju penutupan Triwulan IV Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Triwulan III Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana progres pelaksanaan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), memetakan permasalahan atau kendala yang memicu keterlambatan, serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Melalui laporan ini, diharapkan Camat beserta Sekretariat dan seluruh Kepala Seksi terkait memperoleh rekomendasi strategis dan langkah mitigasi risiko yang solutif guna memacu kinerja organisasi agar tetap berada di jalur yang tepat dalam mencapai target akhir tahun.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika Penyajian

LKjIP Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Seruyan Raya disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan; Bab II Perencanaan Kinerja; Bab III Akuntabilitas Kinerja yang memuat capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, hambatan/permasalahan, dan rencana aksi tindak lanjut; serta Bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 bersifat target tahunan (bukan target periodik). Berikut disajikan IKU beserta target kumulatif sampai dengan Triwulan III Tahun 2025:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW III 2025
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71 (B)
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85

B. Perjanjian Kinerja dan Target Triwulanan

Target Kinerja Utama (IKU) dan Target Penyerapan Anggaran yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dipecah menjadi target periodik per triwulan dengan pendekatan kumulatif, sebagai instrumen pengendalian bagi manajemen untuk memantau laju pencapaian kinerja fisik dan realisasi anggaran. Alokasi pagu anggaran Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.334.980.000, yang terbagi ke dalam 6 (enam) program kerja sebagaimana disajikan pada Bab III.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Ket.
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	B (71)	D (0)	Belum Tercapai
2	Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	-	Survei TW IV

Capaian Kinerja Nilai SAKIP memperoleh predikat D (0), tidak mencapai target B (71), disebabkan oleh keterlambatan dalam pengumpulan LKPM SAKIP ke Inspektorat Daerah. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat diukur pada Triwulan III karena survei baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.

B. Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Realisasi anggaran per program pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi TW III (Rp)	% Realisasi	Status
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.253.485.000	586.327.835	18,02%	Berjalan
2	Program Penyelenggaraan	1.330.000	0	0%	Tertunda

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi TW III (Rp)	% Realisasi	Status
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.700.000	0	0%	Tertunda
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.100.000	0	0%	Tertunda
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.370.000	46.370.000	100%	Selesai
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.995.000	0	0%	Tertunda

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menyerap porsi terbesar pagu kecamatan (97,5%), dengan pos Gaji dan Tunjangan ASN sebagai motor utama penggerak serapan anggaran. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah berstatus Selesai dengan realisasi 100%, ditandai terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan (50 orang) dan pembinaan kerukunan antar suku (38 orang). Sebaliknya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih menunjukkan realisasi 0% pada periode ini.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun 2025, diperoleh Pagu Anggaran Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 sebesar Rp3.334.980.000, dengan Realisasi Triwulan III (murni) sebesar Rp632.697.835 (18,97% dari pagu), dan Akumulasi Realisasi yang Dievaluasi sebesar Rp2.046.232.917 (61,36% dari pagu). Secara akumulatif, penyerapan anggaran hingga periode evaluasi telah mencapai 61,36%. Meskipun

menunjukkan progres yang lebih baik dibanding performa murni Triwulan III, angka ini masih berada di bawah target ideal menjelang akhir tahun anggaran (ideal >75%).

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Pagu Rp3.253.485.000 (97,5% dari total anggaran kecamatan); Realisasi Anggaran Evaluasi Rp1.984.862.917 (61,01%); pos Gaji dan Tunjangan ASN menyerap Rp1.536.019.063 dari target Rp2,41 miliar.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan: Pagu Rp29.700.000; Realisasi Anggaran Evaluasi Rp15.000.000 (50,50%); sub-kegiatan Peningkatan Partisipasi Forum Musrenbangdes terealisasi 100% (5 Lembaga Kemasyarakatan), namun sub-kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat (2.01.03) masih bernilai 0.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum: Pagu Rp46.370.000; Realisasi Anggaran Evaluasi Rp46.370.000 (100%); berstatus Selesai.

D. Hambatan dan Permasalahan

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah memperoleh predikat D (0) akibat keterlambatan pengumpulan LKPM SAKIP ke Inspektorat Daerah.
2. Struktur anggaran masih inward-looking; 97,5% pagu tersedot Program Penunjang Urusan , sementara program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Pemberdayaan Desa, Pelayanan Publik, Trantibum) memiliki pagu minim dan sering backloading ke akhir tahun.
3. Ketergantungan terhadap pihak ketiga/instansi vertikal pada Program Koordinasi Trantibum (7.01.04) yang realisasinya masih 0%; sulit menyinkronkan jadwal dengan Polsek, Koramil, dan instansi vertikal lain akibat perbedaan prioritas agenda.
4. Keterlambatan penyerapan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa; sub-kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat (2.01.03) masih bernilai 0 akibat lambatnya respons kelengkapan administrasi/proposal dari lembaga kemasyarakatan desa.
5. Sisa anggaran pemeliharaan Barang Milik Daerah (kendaraan dinas dan gedung kantor) sebesar ± Rp82.000.000 belum terealisasi (realisasi TW III 0%).

6. Keterlambatan sinkronisasi dokumen pasca-pergeseran anggaran, antara lain pada pos pengadaan mebel dan pengadaan barang milik daerah lainnya, yang realisasinya masih rendah (2%).

E. Rencana Aksi Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2025, disusun matriks rencana aksi tindak lanjut sebagai instrumen pengendalian (early warning system) menuju penutupan Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut:

N o	Hambatan/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status
1	Nilai SAKIP TW III predikat D (0) akibat keterlambatan pengumpulan LKPM SAKIP ke Inspektorat Daerah.	Percepat penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP agar tidak terlambat pada periode berikutnya.	Membentuk tim penyusun LKPM SAKIP internal; menyusun jadwal internal (H-7 dari batas waktu Inspektorat); asistensi ke Inspektorat sebelum batas akhir.	Minggu ke-2 Oktober 2025	Sekretariat Kecamatan / Subbag Program	Dalam Proses
2	Struktur anggaran inward-looking; 97,5% pagu tersedot Program Penunjang Urusan, program bersentuhan masyarakat minim & backloading.	Eksekusi Program Non-Rutin: asistensi intensif pada Program 2, 4, dan 6 agar anggaran tersisa	Menyusun jadwal definitif seluruh sub-kegiatan Program 2, 4, dan 6 TW IV; koordinasi dengan Bagian Keuangan; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.	TW IV (Okt–Des 2025)	Camat / Seluruh Kasi Terkait	Direncanakan

N o	Hambatan/Perma salahan	Rekomen dasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Targ et Wakt u	Penanggu ng Jawab	Status
		segera diserap.				
3	Ketergantungan pihak ketiga/instansi vertikal pada Program Koordinasi Trantibum (7.01.04), realisasi masih 0%.	Perkuat koordinasi lintas sektor melalui penjadwal an bersama dengan instansi vertikal.	Mengirim surat permohonan penjadwalan kepada Polsek dan Koramil; rapat Forkopimcam; melaksanakan kegiatan sinergitas sesuai kesepakatan.	TW IV (Okt– Des 2025)	Kasi Trantibum	Dalam Proses
4	Keterlambatan penyerapan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa; sub-kegiatan 2.01.03 masih 0 akibat lambatnya respons administrasi desa.	Percepat penyerapa n program bersentuh an masyarak at melalui pendampi ngan administra tif.	Pendampingan/a sistensi kepada lembaga kemasyarakatan desa; menetapkan batas waktu dokumen; melaksanakan kegiatan peningkatan efektivitas.	TW IV (Okt– Des 2025)	Kasi Pemberda yaan Masyaraka t Desa	Direncan akan
5	Sisa anggaran pemeliharaan Barang Milik Daerah (kendaraan	Optimalisa si Pemelihar aan Aset:	Menyusun rencana kerja pemeliharaan; mengajukan	TW IV (Okt–	Kasubbag Umum dan Kepegawa ian	Direncan akan

N o	Hambatan/Perma salahan	Rekomen dasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Targ et Wakt u	Penanggu ng Jawab	Status
	dinas & gedung kantor) ± Rp82.000.000 belum terealisasi (0%).	segera realisasikan sisa anggaran pemeliharaan.	proses pengadaan/perbaikan; menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan dinas.	Des 2025)		
6	Keterlambatan sinkronisasi dokumen pasca-pergeseran anggaran (pengadaan mebel & BMD lainnya), realisasi masih rendah (2%).	Percepat proses administrasi pasca-pergeseran anggaran agar tidak menghambat pengadaan.	Koordinasi dengan Bagian Pengelolaan BMD/Keuangan untuk finalisasi dokumen; melanjutkan proses pengadaan sesuai RUP yang disesuaikan.	TW IV (Okt–Des 2025)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dalam Proses

Dari 6 (enam) hambatan/permasalahan yang teridentifikasi pada hasil Monev Triwulan III Tahun 2025, seluruhnya telah ditetapkan rencana aksi tindak lanjut, dengan rincian: 3 (tiga) item berstatus “Dalam Proses”, dan 3 (tiga) item berstatus “Direncanakan” untuk dilaksanakan sepanjang Triwulan IV Tahun 2025. Pelaksanaan tindak lanjut ini akan dipantau secara berkala oleh Camat Seruyan Raya bersama Sekretariat Kecamatan dan seluruh Kepala Seksi terkait.

BAB IV

PENUTUP

1. Realisasi Anggaran: penyerapan anggaran kumulatif mencapai 61,36% (Rp2.046.232.917 dari pagu Rp3.334.980.000), sementara realisasi murni Triwulan III baru mencapai 18,97% (Rp632.697.835). Angka ini masih didominasi pengeluaran rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Ketimpangan Capaian Kinerja Sektoral: Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berhasil mencapai realisasi optimal (100%), namun Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masih mengalami stagnasi (0%).
3. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah memperoleh predikat D (0), tidak mencapai target B (71), akibat keterlambatan pengumpulan LKPM SAKIP ke Inspektorat Daerah.
4. Kendala Administratif dan Operasional: faktor utama belum optimalnya capaian kinerja disebabkan oleh penumpukan jadwal kegiatan non-rutin di akhir tahun (backloading), keterlambatan sinkronisasi dokumen pasca-pergeseran anggaran, serta rendahnya serapan belanja pemeliharaan aset penunjang kerja.

LKJIP Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi landasan objektif bagi pengambilan keputusan strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Seruyan Raya.

Seruyan Raya, 27 Oktober 2025

Pemkot Seruyan Raya,



M. ABDI RAHMAYANIE, S.STP

PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 19860430 200412 1 002

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TRIWULAN IV TAHUN 2025

**KECAMATAN SERUYAN RAYA
KABUPATEN SERUYAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Triwulan IV ini merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kecamatan Seruyan Raya selama periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2025, sekaligus merangkum capaian kinerja secara kumulatif selama satu tahun anggaran.

Tahun Anggaran 2025 merupakan periode transisi perencanaan, ditandai dengan beralihnya Rencana Strategis (Renstra) Periode 2024-2026 menjadi Renstra baru Periode 2025-2029, sehingga turut memicu penetapan ulang Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih relevan dan adaptif. Laporan ini memuat perbandingan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja dan anggaran per triwulan, disertai analisis atas hambatan, permasalahan, serta langkah mitigasi yang telah dilakukan.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Kecamatan Seruyan Raya serta menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Seruyan Raya, 05 Januari 2026
Camat Seruyan Raya,



M. ADI RAHMANIE, S.STP
PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 19860430 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Isu Strategis Kecamatan Seruyan Raya
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
- C. Perjanjian Kinerja dan Target Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN IV

- A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV
- B. Realisasi Anggaran Triwulan IV
- C. Analisis Pola Penyerapan (Backloading)
- D. Hambatan dan Permasalahan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berorientasi pada hasil, serta akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu instrumen akuntabilitas yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi pada Triwulan IV menjadi fase krusial untuk mengukur konsistensi antara perencanaan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja aktual yang berhasil diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Tahun Anggaran 2025 menjadi periode transisi yang sangat dinamis sekaligus krusial bagi tata kelola perencanaan di Kecamatan Seruyan Raya. Dinamika regulasi dan penyesuaian arah kebijakan makro daerah menuntut terjadinya perubahan mendasar pada dokumen perencanaan jangka menengah organisasi, yaitu beralihnya Rencana Strategis (Renstra) Periode 2024-2026 menjadi Renstra baru Periode 2025-2029. Perubahan garis waktu dan substansi perencanaan ini secara otomatis memicu reorientasi pada target-target kinerja makro, termasuk penetapan ulang Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2025-2029 yang lebih relevan, terukur, dan adaptif terhadap tantangan kewilayahan lima tahun ke depan.

Adanya transisi dari Renstra 2024-2026 ke Renstra 2025-2029 berimplikasi langsung terhadap refocusing program dan penyesuaian target operasional dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan. Oleh karena itu, capaian kinerja yang dievaluasi pada Triwulan IV 2025 ini tidak lagi sekadar mencerminkan pemenuhan target tahunan jangka pendek, melainkan menjadi baseline (data dasar) sekaligus tolok ukur awal yang akan menentukan potret keberhasilan implementasi IKU 2025-2029 pada tahun-tahun berikutnya.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Seruyan Raya tercatat sebesar 61,36% (Rp2.046.232.917 dari total pagu Rp3.334.980.000). Kendati pos belanja rutin birokrasi berjalan stabil, terdapat tantangan berupa penumpukan realisasi program (backloading) pada triwulan pemungkas. Program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat -seperti Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa- menuntut akselerasi penuh pada Triwulan IV demi mengejar target-target yang telah diselaraskan dengan koridor Renstra dan IKU 2025-2029.

Melalui konteks transisi strategis tersebut, penyusunan LKJIP Triwulan IV ini menjadi dokumen yang sangat vital, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepatuhan administratif atas penggunaan APBD, melainkan juga sebagai instrumen analisis kritis untuk menilai kesiapan fondasi operasional Kecamatan Seruyan Raya dalam mengawal dokumen Renstra 2025-2029 serta merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di tahun anggaran berikutnya.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan, struktur organisasi Kecamatan Seruyan Raya terdiri atas Camat, Sekretaris Camat yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan empat Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Seksi Pelayanan Sosial.

1. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas umum pemerintahan, meliputi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah, serta tugas-tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Camat bertugas melakukan pembinaan serta memberikan dukungan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan.

2. Fungsi

Camat menjalankan fungsi koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelayanan masyarakat pada lingkup tugasnya.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi Desember 2025, jumlah pegawai Kecamatan Seruyan Raya sebanyak 29 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 3 orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 10 orang. Pada realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV tercatat jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN menurun dari target 22 orang/bulan menjadi realisasi 17 orang/bulan, yang mengindikasikan adanya mutasi keluar atau pensiun pegawai di tengah tahun anggaran yang belum terisi kembali.

C. Isu Strategis Kecamatan Seruyan Raya

Potensi Daerah Kecamatan Seruyan Raya yang utama adalah sektor perkebunan, khususnya perkebunan sawit, yang kerap menimbulkan sengketa pertanahan (konflik agraria) antara masyarakat dan perusahaan sawit. Selain itu, deforestasi dan kerusakan hutan menjadikan wilayah Kecamatan Seruyan Raya rentan terhadap bencana alam banjir. Potensi wisata Desa Bangkal dengan kekayaan budaya adat dan wisata susur sungai berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut, sejalan dengan potensi ekonomi wilayah yang cukup besar mengingat posisinya sebagai jalur lintas dengan perputaran ekonomi yang cepat.

Isu-isu strategis tersebut meliputi: konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, penguatan kelembagaan ekonomi, penguatan industri lokal, pengembangan pariwisata, serta peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan memuat gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika. BAB II Perencanaan Kinerja memuat rencana strategis, indikator kinerja utama, serta perjanjian kinerja dan target anggaran tahun berjalan. BAB III Akuntabilitas Kinerja Triwulan IV memuat perbandingan target dan realisasi kinerja, realisasi anggaran, analisis pola penyerapan anggaran, serta hambatan dan permasalahan. BAB IV Penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029 selaras dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, dengan Visi “Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua”. Kecamatan Seruyan Raya berkontribusi pada Misi III yaitu “Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa”. Tujuan Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah dan Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.

Pada Tahun Anggaran 2025 terjadi transisi dokumen perencanaan dari IKU Periode 2024-2026 menjadi IKU Periode 2025-2029, sebagai konsekuensi diberlakukannya Renstra baru sesuai RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 yang menjadi acuan evaluasi Triwulan IV adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW IV 2025
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	57
2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	%	100

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 / Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja dan Target Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama, dilaksanakan 6 (enam) program dengan rincian target kinerja dan pagu anggaran awal sebagai berikut:

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran Awal (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	85%	3.394.509.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran Awal (Rp)
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	85%	7.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa Mandiri	85%	38.660.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	85%	2.100.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	85%	46.370.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	85%	10.500.000

Sepanjang tahun berjalan, dokumen Perjanjian Kinerja mengalami penyesuaian (perubahan) mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029, sehingga total pagu anggaran akhir Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.333.995.765.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN IV

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran Kecamatan Seruyan Raya khusus periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025, sekaligus akumulasi capaian selama satu tahun anggaran.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	57	0 (D)
2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	%	100	80

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 0 (predikat D) dari target 57, yang disebabkan oleh keterlambatan pengumpulan Lembar Kerja Penilaian Mandiri (LKPM) SAKIP kepada Inspektorat Daerah, meskipun dokumen pendukung SAKIP lainnya telah lengkap dan sesuai. Sementara itu, Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa mencapai realisasi 80% dari target 100%, dikarenakan satu desa di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Tabiku) masih berstatus Desa Maju.

B. Realisasi Anggaran Triwulan IV

Realisasi keuangan dan fisik Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 secara kumulatif dan khusus Triwulan IV disajikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pagu Anggaran Total Tahun 2025	Rp3.333.995.765
Realisasi Anggaran s.d. Akhir Tahun (Kumulatif)	Rp3.259.575.087
Persentase Serapan Anggaran Kumulatif	97,77%
Sisa Anggaran	Rp74.420.678
Realisasi Khusus Triwulan IV	Rp1.213.342.170 (36,39% dari total pagu)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu program ini sebesar Rp3.161.199.365 (menguasai 94,8% dari total anggaran kecamatan) dengan realisasi Rp3.086.962.387 atau 97,65%. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terserap Rp2.070.197.163 dari pagu Rp2.116.652.731 (97,81%), dengan penurunan realisasi jumlah pegawai penerima dari target 22 orang/bulan menjadi 17 orang/bulan yang mengindikasikan adanya mutasi keluar atau pensiun pegawai yang belum terisi kembali di tengah tahun. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi mengalami lonjakan realisasi fisik yang signifikan, dari target 150 laporan menjadi realisasi 227 laporan, namun tetap efisien secara anggaran (Rp389.078.900 dari pagu Rp391.299.000). Kegiatan Pengadaan Mebel serta Peralatan dan Mesin Lainnya berhasil diselesaikan 100% pada akhir tahun (108 unit mebel senilai Rp79,3 juta dan 10 unit peralatan/mesin senilai Rp62,2 juta) setelah sempat melambat pada Triwulan III.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pagu program ini sebesar Rp65.372.000 dengan realisasi Rp65.188.300 atau 99,72%. Program ini mencatatkan realisasi finansial 0% pada Triwulan I-III, namun seluruh anggaran berhasil dicairkan sekaligus pada Triwulan IV. Target fisik seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (5 lembaga kemasyarakatan) dan 5 laporan peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat tuntas 100%, menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi/proposal dari tingkat desa baru rampung menjelang akhir tahun.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pagu program ini sebesar Rp102.299.400 dengan realisasi Rp102.299.400 atau 100%. Program ini menjadi yang paling sehat pola penyerapannya karena berjalan bertahap: sebesar Rp55.929.400 (54,67%) dieksekusi sebelum Triwulan IV untuk kegiatan pembinaan kerukunan antar suku, dan sisanya sebesar Rp46.370.000 diselesaikan pada Triwulan IV, termasuk kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi 50 orang yang sebelumnya terealisasi 0%.

4. Program Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban, serta Pembinaan Pemerintahan Desa

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (pagu Rp1.330.000), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (pagu Rp1.800.000), dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (pagu Rp1.995.000) masing-masing terealisasi 100%. Ketiga program tersebut memiliki pagu anggaran relatif kecil yang bersifat stimulan/fasilitasi non-fisik, dengan seluruh target output seperti dokumen pelayanan, 12 laporan sinergitas dengan TNI/Polri, serta fasilitasi regulasi desa berhasil diselesaikan sepenuhnya.

C. Analisis Pola Penyerapan Anggaran (Backloading)

Kinerja keuangan dan fisik Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat tinggi secara kumulatif, namun dengan pola penyerapan yang menumpuk pada fase akhir

tahun (backloading). Hingga Triwulan III, realisasi anggaran baru mencapai 61,36% dari total pagu, sementara realisasi khusus Triwulan IV mencapai Rp1.213.342.170 atau setara 36,39% dari total pagu yang diserap hanya dalam satu triwulan. Pola ini paling terlihat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terealisasi 0% pada Triwulan I-III dan baru dicairkan penuh pada Triwulan IV, serta pada beberapa sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terkonsentrasi penyelesaiannya di akhir tahun.

D. Hambatan dan Permasalahan

Berdasarkan perbandingan dengan data evaluasi triwulan sebelumnya, teridentifikasi beberapa hambatan sekaligus langkah mitigasi yang telah dilakukan manajemen Kecamatan Seruyan Raya pada Triwulan IV, sebagai berikut:

1. Keterlambatan Pengumpulan LKPM SAKIP: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 tercatat 0 (D) akibat keterlambatan penyampaian Lembar Kerja Penilaian Mandiri (LKPM) kepada Inspektorat Daerah, meskipun dokumen SAKIP lainnya telah lengkap dan sesuai.
2. Akselerasi Belanja Pengadaan Barang/Aset: Hambatan proses kontrak pengadaan mebel dan peralatan kantor yang sempat menumpuk berhasil dieksekusi pada Triwulan IV melalui optimalisasi hubungan dengan pihak ketiga (vendor).
3. Penyelesaian Administrasi Desa: Keterlambatan pencairan dana evaluasi/pemberdayaan masyarakat desa pada Triwulan I-III berhasil diatasi pada Triwulan IV, dengan harapan tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.
4. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur: Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur pada kantor Kecamatan Seruyan Raya, serta jauhnya jarak tempuh antara kecamatan ke kabupaten yang berpengaruh pada pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan.
5. Perbedaan Status Desa: Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan belum mencapai target 100% karena satu desa (Desa Tabiku) masih berstatus Desa Maju, disebabkan belum lengkapnya sarana pendidikan tingkat menengah atas serta belum optimalnya produktivitas BUMDes di desa tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Seruyan Raya kepada seluruh elemen masyarakat yang menjadi stakeholder.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring hingga periode Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Utama: Nilai SAKIP Perangkat Daerah masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan capaian 0% (Predikat D), murni disebabkan oleh keterlambatan pengumpulan LKPM ke Inspektorat, meskipun dokumen pendukung SAKIP lainnya sudah lengkap dan sesuai. Persentase Desa berstatus Swasembada mencapai 80% dari target 100%, karena satu desa (Desa Tabiku) masih berstatus Desa Maju.
2. Realisasi Anggaran: Kecamatan Seruyan Raya secara umum sukses memenuhi target penyerapan anggaran, dengan total realisasi sebesar Rp3.259.575.087 atau 97,77% dari pagu Rp3.333.995.765, dan pemenuhan target indikator fisik rata-rata di atas 95%.
3. Pola Penyerapan: Terdapat pola penumpukan realisasi anggaran (backloading) pada Triwulan IV, dengan realisasi khusus triwulan ini mencapai 36,39% dari total pagu tahunan, terutama pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta belanja pengadaan barang milik daerah.
4. Transisi Perencanaan: Dokumen transisi seperti penyusunan instrumen Renstra baru 2025-2029 dan IKU baru berhasil didukung oleh fondasi keuangan yang akuntabel, sehingga menjadi baseline yang memadai bagi pelaksanaan tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV ini disusun, diharapkan dapat menjadi landasan objektif bagi pengambilan keputusan strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Seruyan Raya.

Seruyan Raya, 05 Januari 2026

Camat Seruyan Raya,



M. ABD. RAHMAN, S.STP

PEMUDA Tk. I (IV/b)

NIP. 19860430 200412 1 002